KAJIAN PENERAPAN MANAJEMEN ASET DAERAH WISATA DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN PESISIR SELATAN

Febrimen Herista

Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat febrimenherista@gmail.com

Abstract: The results of the research conducted, discovered that: 1). District asset controlling system has significant positive influence to the empowerment of district asset; 2) District asset accounting system has non significant positive influence to the empowerment of district asset; 3) The empowerment of district asset has non significant positive influence to the districts asset performance; 4) The performance of district asset has significant positive influence to the district's genuine revenue; 5) District asset accounting has significant positive influence to district asset controlling system; 6) District asset controlling system has non significant positive influence to district asset performance; 7) District asset accounting system has non significant positive influence to the district asset performance; 8)District asset controlling system has non significant positive influence to district actual income; 9) accounting system of district asset has non significant positive influence to district actual income; 9) accounting system of district asset has non significant positive influence to district actual income.

Keywords: The Management Control Of District Assets, Empowerment Of District Assets, District Asset Accountancy, District Actual Income.

Abstrak: Hasil penelitian yang dilakukan, menemukan bahwa: 1). Sistem pengendalian aset kabupaten memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap pemberdayaan aset kabupaten; 2) Sistem akuntansi aset kabupaten memiliki pengaruh positif tidak signifikan terhadap pemberdayaan aset kabupaten; 3) Pemberdayaan aset kabupaten memiliki pengaruh positif tidak signifikan terhadap kinerja aset kabupaten; 4) Kinerja aset daerah memiliki pengaruh positif signifikan terhadap pendapatan asli daerah; 5) Akuntansi aset kabupaten memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap sistem pengendalian aset kabupaten; 6) Sistem pengendalian aset kabupaten memiliki pengaruh positif tidak signifikan terhadap kinerja aset kabupaten; 7) Sistem akuntansi aset kabupaten memiliki pengaruh positif tidak signifikan terhadap kinerja aset kabupaten; 8) Sistem pengawasan aset kabupaten memiliki pengaruh positif tidak signifikan terhadap pendapatan aktual kabupaten; 9) sistem akuntansi aset kabupaten memiliki pengaruh positif tidak signifikan terhadap pendapatan aktual kabupaten aktual kabupaten.

Kata kunci: Kontrol Manajemen Aset Daerah, Pemberdayaan Aset Daerah, Akuntansi Aset Daerah, Pendapatan Asli Daerah.

A. Pendahuluan

Pemerintah daerah otonom berkewajiban melakukan suatu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan pemerintahan di daerahnya secara periodik, negara sebagai sebuah badan hukum publik pada umumnya mempunyai kewajiban yuridis dan administratif dalam hal penyelenggaraan dan pengelolaan serta pertanggungjawaban keuangan negara, seperti penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta proses perencanaan pembangunan dan sebagainya.

Perkembangan ekonomi di Kabupaten Pesisir Selatan dengan 15 kecamatan,

dan 182 nagari, serta jumlah penduduk pada tahun 2017 sebesar: 532.429 jiwa, dengan tingkat pertumbuhan ekonomi sebesar 5,29% pada tahun 2017, dimana tingkat pertumbuhan kawasan ini cukup tinggi sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2017.

Tabel 1 Perkembangan PDRB Provinsi Sumatera Barat Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku Periode Tahun : 2013 s/d 2017 (Dalam Jutaan)

Tahun	Total PDRB Tahuna	Kenaikan	%
2013	152.393.957,08		
2014	164.944.256,80	12.550.299,72	8,24
2015	179.951.980,32	15.007.723,52	9,10
2016	196.442.935,07	16.490.954,75	9,16
2017	214.585.229,26	18.142.294,19	9,24

Sumber: BPS Sumatera Barat; katalog 9302008.13

Tabel 1 diatas menggambarkan adanya suatu peningkatan ekonomi regional di Provinsi Sumatera Barat yang cukup signifikan dari tahun 2013 sampai dengan 2017, yang dalam hal ini peran serta daerah Kabupaten Pesisir Selatan termasuk cukup signifikan dan berarti, hal ini yang menjadi dasar yang kuat bagi peneliti untuk meneliti dan mencoba mengkaji dan menganalisa hal tersebut secara komprehensif.

B. Metodologi Penelitian.

Populasi untuk penelitian ini adalah seluruh badan pengelola aset daerah dibidang parawisata yang meliputi, dinas pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan yang terdiri dari: 1) Populasi Penelitian terdiri seluruh badan dan lembaga yang terkait dengan sistem pengelolaan aset daerah Kabupaten Pesisir Selatan yang mengelolah aset wisata, baik wisata alam maupun wisata budaya, antara lain meliputi: a) Dinas Parawisata Pemuda dan Olah Raga; b) badan Pendapatan Daerah; c) Dinas terkait (SKPD) yang memiliki keterkaitan koordinasi dalam suatu kegiatan pengelolaan aset daerah; dan d) Badan lain yang dibentuk pemerintah daerah untuk tugas parawisata dan peningkatan pendapatan aset daerah (Badan Pengelola Keuangan Daerah di Kabupaten Pesisir Selatan-BPKD). 2) Sampel Penelitian adalah seluruh populasi yang ada, sesuai dengan badan dan lembaga yang sifat kerja dan tugasnya adalah melakukan pengendalian aset wisata daerah di objek penelitian, antara lain: a) Aset Objek wisata yang dikelolah sendiri oleh pihak pemerintah daerah secara otonom, maka dinas terkait yang membawahinya seperti Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga yang merupakan sumber data serta informasi; b) Dinas-dinas lain yang berada dalam lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan terutama Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Pesisir Selatan, yang antara lain memiliki data tentang jumlah penerimaan atau pendapatan dari hasil pengelolaan aset daerah wisata di Kabupaten Pesisir Selatan; c) Sekretariat Daerah yang mengatur struktur manajemen pemerintahan daerah beserta parmanen file atas semua aset daerah tersebut, untuk melihat jumlah dan nilai aset daerah dimaksud beserta struktur kepemilikannya dan model pengelolaanya; dan d) Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Pesisir Selatan yang memiliki tugas untuk mengawasi dan melakukan koordinasi dengan pihak kemitraan dalam pengelolaan aset daerah. Jumlah populasi dan sampel penelitian ini terbatas pada beberapa dinas dan lembaga yang

terkait dengan keparawisataan maka penentuan besar dari sampel dan populasi penelitian ini adalah seluruh dari dinas dan lembaga terkait tersebut atau sebesar 100% dari sumber informasi yang dibutuhkan dan data yang akan dipakai sebagai bahan kajian.

C. Hasil dan Pembahasan

Dari hasil kuisioner yang dilakukan pada objek penelitian dengan total responden sesuai dengan jumlah populasi yang ada, maka hasil kuisioner adalah sebagai berikut :

Tabel 3 Distribusi Hasil Kuisioner Sistim Pengendalian Aset Daerah Sistim Informasi Manajemen Aset Daerah

Nos	Variabel / Sub Variabel	Score
1. u	Inisiatif Pelaporan Kerja	4.135
2. m	Bertanggung jawab dengan analisa yang mendukung	3.676
3.	Memberikan informasi yang berkualitas.	3.582
4.	Mempergunakan alat analisa	4.000
5.	Memiliki sudut pandang Going Concern	3,946
6.	Memberikan Rekomendasi	3,973
	Rerata	3,885

Sumber: Hasil Olahan Data Penulis.

Hasil kuisioner diatas memberikan gambaran bahwa sistim informasi aset daerah dari objek penelitian ini telah berjalan dengan baik, secara rata-rata semua variabel diatas telah dapat dikendalikan dalam suatu sistim pengendalian manajemen aset daerah yang baik (score: 3,885)

Tabel 4 Distribusi Hasil Kuisioner Sistim Pengendalian Aset Daerah Efektifitas Pengendalian Manajemen Aset Daerah

No.	Variabel/ Sub Variabel	Score
1 2 3	Ketepatan waktu laporan manajemen aset daerah. Jadwal pengawasan berkala atas aset daerah Mempergunakan alat analisa dalam laporan manajemen Aset daerah yang ada.	3,986 4.135 3,595
	Rerata	3,905

Sumber: Hasil Olahan Data Penulis.

Dalam pengendalian manajemen aset daerah, maka ukuran efektifitas pengendalian manajemen tergantung pada variabel yang digambarkan diatas, menunjukan bahwa umumnya pengendalian yang dijalankan telah memiliki pengaruh yang baik dalam sistimpengendalian manajemen aset daerah pada objek penelitian (Score rata-rata: 3,905)

Tabel 5 Distribusi Hasil Kuisioner Sistim Akuntansi Aset Daerah Sistim Informasi Akuntansi Aset Daerah

No	Variabel/Sub Variabel	Score
1	Sistim Akuntansi atas Aset Daerah	3.527
2	Patuh sistim Akuntansi Aset daerah	3.568
	Rerata	3 548

Sumber: Hasil Olahan Data Penulis.

Hasil kuisioner diatas menunjukan bahwa informasi akuntansi atas aset daerah telah memiliki sistim informasi akuntansi aset daerah yang baik dan dilakukan dalam suatu sistim yang dapat dikendalikan dan telah dijalankan pada objek penelitian ini.

Tabel 6 Distribusi Hasil Kuisioner Sistim Akuntansi Aset Daerah Sistim Pencatatan Akuntansi Aset Daerah

No	Variabel/Sub Variabel	Score
1 3		3.703
2 u	Data pencatatan akuntansi dan hasil catatan aset daerah	3,757
3 111	Intensitas kesalahan atas pencatatan akuntansi aset daerah	3,081
	Rerata	3,514

Sumber: Hasil Olahan Data Penulis.

Hasil kuisioner diatas memberikan gambaran bahwa dalam melakukan akuntansi atas aset daerah pada objek penelitian ini, menunjukan bahwa semua aset daerah yang ada telah dicatat dan dilakukan sesuai dengan sistim pencatatan akuntansi aset daerah yang baik (score rata-rata. 3,514). Kondisi ini memberikan gambaran yang kuat bahwa pada objek penelitian ini, sistim informasi akuntansi aset daerah telah berjalan dengan sebagaimana mestinya.

Tabel 7 Distribusi Hasil Kuisioner Sistim Akuntansi Aset Daerah Sistim Pelaporan Akuntansi Aset Daerah

No	Variabel/Sub Variabel	Score
1 2	Pelaporan untuk pemanfaatan aset daerah Kegagalan dalam memberikan laporan aset daerah	3,865 2,662
	Rerata	3,264

Sumber: Hasil Olahan Data Penulis.

Hasil kuisioner diatas memberikan gambaran bahwa sistim pelaporan aset daerah dalam suatu mekanisme sistim akuntansi aset daerah pada objek penelitian ini, telah dilakukan dengan baik.

Tabel 8 Pemberdayaan Aset Daerah

No	Variabel/Sub Variabel	Score
1 2	Peraturan dan Pemnafaatan aset Daerah Wewenang pengendalian manajemen aset daerah	3,541 3,595
	Rerata	3,568

Sumber: Hasil Olahan Data Penulis.

Hasil kuisioner diatas memberikan gambaran bahwa proses pemberdayaan aset daerah pada objek penelitian ini memberikan suatu proses pemberdayaan aset daerah yang baik.

D. Penutup

Berdasarkan tujuan dan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut: a) Sistem pengendalian aset daerah berpengaruh signifikan terhadap pemberdayaan aset daerah; b) Sistem akuntansi aset daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap pemberdayaan aset daerah; c) Pemberdayaan aset daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja aset daerah; d) Kinerja aset daerah berpengaruh signifikan terhadap

pendapatan asli daerah; e) Sistem akuntansi aset daerah berpengaruh signifikan terhadap sistem pengendalian aset daerah; f) Sistem pengendalian aset daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja aset daerah; g) Sistem akuntansi aset daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja aset daerah; h) Sistem pengendalian aset daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah; dan i) Sistem akuntansi aset daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah.

Daftar Pustaka

- Abdul Halim, (2002), "Akuntansi Keuangan Daerah". Salemba Empat, Jakarta.
- Ahmad Subagyo, (2007) , "Study Kelayakan"- Teori & Aplikasi, Elex Media Komputindo. Jakarta.
- Alan Barker (2000), "Mengelola Sumber daya Manusia" Terjemahan, Salemba Empat- Jakarta.
- Anonimous, (1995), "Pengenalan masalah untuk perencanaan pembangunan dalam perencanaan sebagai suatu dialog, "LAN DSE. Jakarta.
- Armida,S. Alisjahbana, (1998), " *Strategi penyelenggaraan keuangan daerah* ": Alasan tuntutan perimbangan keuangan pusat dan daerah Hak daerah dalam pembagian keuangan yang adil, Lembaga Penerbit FE- UI, Jakarta.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat (2017), " Sumatera Barat Dalam Angka", BPS- Sumbar. Padang.
- Bambang P.S. Brojonegoro, (2003), " *Menciptakan perekonomian daerah yang kompetitif*", Salemba Empat FE-UI, Jakarta.
- Raymond Mc Leod Jr & George Schell, (2004), "Management Information System", Person Prentice Hall- New York.
- Revrisond Baswir, (1999), "Akuntansi Pemerintahan Indonesia", BPFE- Yogyakarta.
- Riyadi dan Bratakusumah, Deddy Supriady,(2004), "Perencanaan Pembangunan Daerah, Strategi menggali potensi dalam mewujudkan otonomi daerah". PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Robert N. Anthony, Vijay Govindarajan, (2005), "Sistim Pengendalian Manajemen", Terjemahan : Salemba Empat, Jakarta.
- Sondakh, L.W, (2003), "Globalisasi dan Desentralisasi: Perspektif ekonomi local", Jakarta lembaga penerbit FE. Universitas Indonesia.
- Soeria Atmadja, Arifin P. (1986): " *Mekanisme Pertanggung jawaban Keuangan Negara*": Suatu Tinjauan Yurudis . Jakarta : Gramedia.
- Soemardjo Tjitrosidojo,(1977), "Controllership" Bahan Kuliah Institut Ilmu Keuangan, Jakarta.
- Steven Pressman,(2002), "Lima Puluh Pemikir Ekonomi Dunia", Raja Grafindo Persada Jakarta.
- Theodorus. M. Tuanakotta, (1985), "Teori Akuntansi", LPFE- UI, Jakarta.
- Umar, Asri (1999) " Kerangka strategis perubahan manajemen keuangan daerah, sebagai implikasi UU-RI No. 22 Thn. 1999 dan UU- RI No. 25 Thn.1999 ", PSPP, Jakarta Juli-Desember.
- Vernon Kam,(1990), " *Accounting Theory*" second edition- John Wiley & Sons, California State University.
- William.F.Glueck Lawrence.R.Jauch, (1984), " *Strategic Management and Bussines Policy*" Second Edition McGraw-Hill, Inc- University of Georgia.